PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **YUDHA ARMAN**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK**
3. NHK : **845917**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 692.000.000

1. Tanah Seluas 353 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/126 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
3. Tanah Seluas 221 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG , HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
4. Tanah Seluas 2400 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 244.100.000

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000
5. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
6. MOBIL, TOYOTA SIENTA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 168.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. ----

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	89.932.306
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	1.026.032.306
III.	HUTANG	Rp.	70.000.000
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	956.032.306

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.